

ANALISIS FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA KINERJA KEUANGAN KOTA BENGKULU



Septriani¹, Armelly², Retno A. Ekaputri³, Esti Pasaribu⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

¹septriani@unib.ac.id, ²armelly@unib.ac.id, ³retnoae@unib.ac.id, ⁴estipasaribu@unib.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Flypaper Effect, Regional Expenditure, Locally-Generated Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU)

The purpose of this research is to know the possibility of flypaper effect on Financial Performance of Bengkulu City by knowing the influence of locally-generated revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) to Bengkulu City. This reaseach used the time series data about the Budget Realization Report of Bengkulu City and the Financial Statistics of Bengkulu Province which provided by the Central Bureau of Statistics of Bengkulu Province. Data analysis tool used is multiple regression analysis. The empirical results of this research shows that the first, PAD has influential positive and significant to regional expenditure against the Bengkulu City, DAU has influential positive and significant regional expenditure against the Bengkulu City. The second, flypaper effect phenomenon is not occurring on financial performance of the Bengkulu City, it is seen of the value of the coefficients PAD greater than the value of the coefficients general allocation fund (DAU) and the result is significant on $\alpha = 0.05$. Based on these results it can be concluded that there was no Flypaper Effect on the financial performance of Bengkulu City.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan (UU No.23, 2014). Pemberian kewenangan ini

memberikan dampak terhadap kinerja keuangan di daerah tersebut. Menurut, Holtz–eakin et.al (1985), terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Prakosa (2004) dan Ashworth et al. (2005) menyatakan bahwa tingkat pendapatan akan memiliki pengaruh positif pada pengeluaran publik. Menurut Setiawan (2010), hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sejak pemerintah Orde Baru hingga diberlakukannya Otonomi Daerah (OD) menyebabkan relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seperti yang dinyatakan oleh Adi (2012), bahwa dalam kebijakan pemberian dana perimbangan ini di satu sisi dimaknai positif, namun di sisi lain justru menjadi disinsentif ataupun demotivasi bagi berbagai pemerintah daerah. Nanga (2005) menyatakan bahwa kebijakan pemberian dalam jumlah sangat besar justru menyebabkan adanya kemalasan fiskal di kalangan pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom. Otonomi daerah tersebut adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.23/2014). Dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), lain – lain pendapatan yang sah dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Menurut Oates (1999), tujuan utama pemberian dana transfer adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemda, kesenjangan fiskal antar pemda, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidak-efisienan fiskal. Dalam UU No.23/2014 dinyatakan bahwa transfer dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

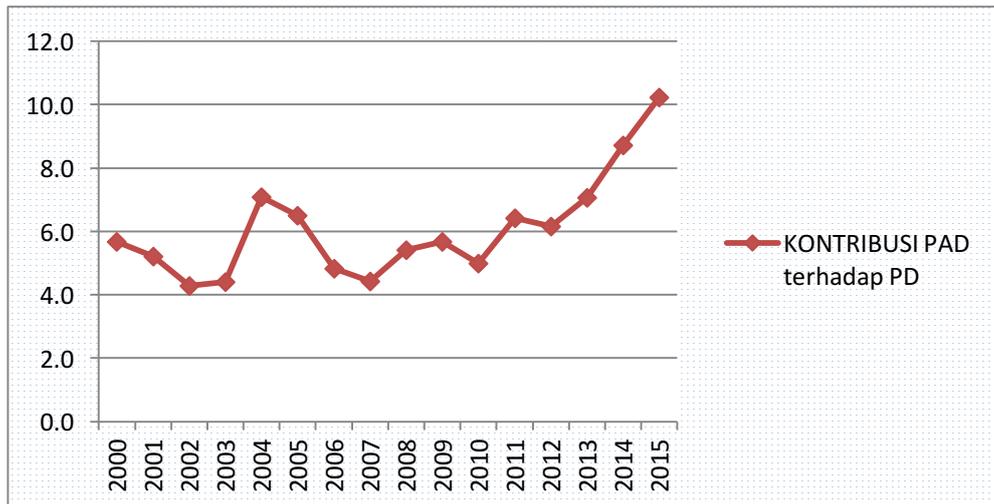
Kebijakan desentralisasi fiskal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta dapat mendukung dan meningkatkan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi (Saragih, 2003). Menurut Elmi (2002),

melalui kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Menurut Sidik (2002), otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Salah satu fenomena yang paling mencolok dari otonomi daerah di Indonesia adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini sangat terlihat jelas dari aspek keuangan. Untuk melihat indikasi ketidakefisienan pada dana transfer tersebut, dapat dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori *flypaper effect*. Menurut Oates dalam Kuncoro (2007) respon di sini merupakan suatu tanggapan langsung dari pemerintah daerah dalam menyikapi transfer dana dalam bentuk dana perimbangan khususnya, Dana Alokasi Umum yang diwujudkan pada anggaran belanja daerah. Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut dengan *flypaper effect*.

Ketidakefisienan dalam manajemen keuangan di Bengkulu ditunjukkan dengan hasil Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan Provinsi Bengkulu yang menunjukkan bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 Realisasi PAD mencapai Rp481,99 milyar (39,57% dari target). Jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah, rasio PAD hanya sebesar 9,10% yang secara umum mengindikasikan rendahnya kemandirian Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu dalam membiayai belanjanya.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan Kota Bengkulu masih berada pada tingkat kemampuan yang sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kota Bengkulu relatif rendah yang berdampak pada kemampuan dalam memenuhi semua kebutuhan daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan analisis mengenai deteksi fenomena kemungkinan *flypaper effect* pada kinerja Keuangan Kota Bengkulu berikut perkembangan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2000-2015.



Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu (BPS Provinsi Bengkulu, data diolah)

Gambar 1
Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bengkulu (%)

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Konsep *Flypaper Effect*

Flypaper effect merupakan suatu penyimpangan dalam teori bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa transfer pemerintah pusat memang meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi ternyata tidak menjadi substitusi bagi pajak daerah. Oates (1999) menyatakan ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerahnya sendiri maka disebut dengan *Flypaper effect*. Hal ini dipertegas oleh Tumbul dalam Megasari (2015) bahwa fenomena *flypaper effect* secara umum membawa implikasi bahwa transfer akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Menurut Moisio dalam Megasari (2015) *flypaper effect* ditunjukkan dengan adanya perbedaan respons belanja atas sumber pendapatan atau penerimaan pemerintah.

Menurut Hines & Thaler (1995), *Flypaper effect* dianggap sebagai suatu keanehan dalam perilaku yang sulit untuk dirasionalkan, di mana pemerintah daerah menggunakan transfer yang mereka terima dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pengeluaran daerah yang mana tidak konsisten dengan teori ekonomi. Transfer di sini adalah pemindahan atau pengiriman dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketika suatu pemerintah daerah menerima transfer dimungkinkan untuk meningkatkan belanja daerah tanpa meningkatkan pajak. Pilihan masyarakat lebih ditentukan pada bagaimana cara uang dibelanjakan. Beberapa peneliti menemukan bahwa respon pemerintah daerah berbeda untuk

transfer dan pendapatan sendiri seperti pajak. Artinya, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah terutama pajak daerah. Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut *Flypaper effect* (Oates, 1999).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No.23 /2014, Sumber pendapatan Daerah terdiri atas; Pendapatan Asli Daerah meliputi (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Sumber PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Berdasarkan UU No.23/2014, sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli Daerah yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. pendapatan transfer yang meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana Desa.
 - b. transfer antar-Daerah terdiri atas: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No.23/2014, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut UU No.33/2004, tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) terutama adalah untuk horizontal *equity* dan *sufficiency*. Tujuan horizontal *equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah.

Belanja Daerah (BD)

Menurut UU No.23/2014, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara menurut Kepmendagri No. 29/2002 disebutkan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah. Pengeluaran ini dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (pemprov dan pempus).

Menurut UU No. 25 tahun 1999 belanja daerah dibagi kedalam dua kelompok yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah belanja yang keluarannya tidak berupa fisik dan terjadi berulang-ulang sepanjang waktu atau periode. Belanja rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, anggaran pinjaman/hutang dan bunga, bantuan keuangan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tak terduga. Belanja pembangunan adalah belanja yang ditujukan untuk pembiayaan proses pembangunan, sebagai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transfer (*Grants*)

Menurut Undang No.33 tahun 2004, transfer (*grants*) atau lebih dikenal dengan dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 1999, transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Transfer atau *grants* dari pemerintah pusat secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni *matching grants* dan *non matching*

grants. Kedua *grants* tersebut digunakan oleh Pemda untuk memenuhi belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik.

Penelitian Terdahulu

Ansori dan Muthmainah (2018), melakukan penelitian tentang fenomena *flypaper effect* atas belanja pemerintah kabupaten/kota di Pulau Bali dan Nusra tahun 2012-2016 dengan menggunakan metode *purposive sampling* jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 187 sampel. Pengujian data dan hipotesis yang digunakan berupa analisis regresi berganda dengan menggunakan program IBM Statistics Version 23. Hal penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* terjadi pada Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra tahun 2012-2016. Hal ini terlihat dari pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

Selain itu, Armawaddin, Rumbia dan Afiat (2017) juga melakukan penelitian terkait Analisis *Flypaper Effect* Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tahun 2016-2017. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menemukan adanya *flypaper effect* pada belanja daerah dari dana alokasi khusus, sedangkan dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil pajak tidak ditemukan. Penelitian ini juga membuktikan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah seluruh kabupaten/kota di Sulawesi.

Nurhayati dan Septiana (2018) juga melakukan penelitian terkait *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Selain itu hasil pengujian ini menyimpulkan terdapat *flypaper effect* pada realisasi APBD di seluruh Pemerintah Provinsi di pulau Sumatera, hal ini disimpulkan berdasarkan hasil pengujian dimana nilai koefisien beta variabel PAD yang lebih kecil dibandingkan koefisien DAU.

Ardanareswari, Laut dan Destiningsih (2019), melakukan penelitian tentang fenomena *flypaper effect* pada PAD, DAU, dan DBH serta Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa Tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pulau Jawa tahun 2013-2017 terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) baik dilihat

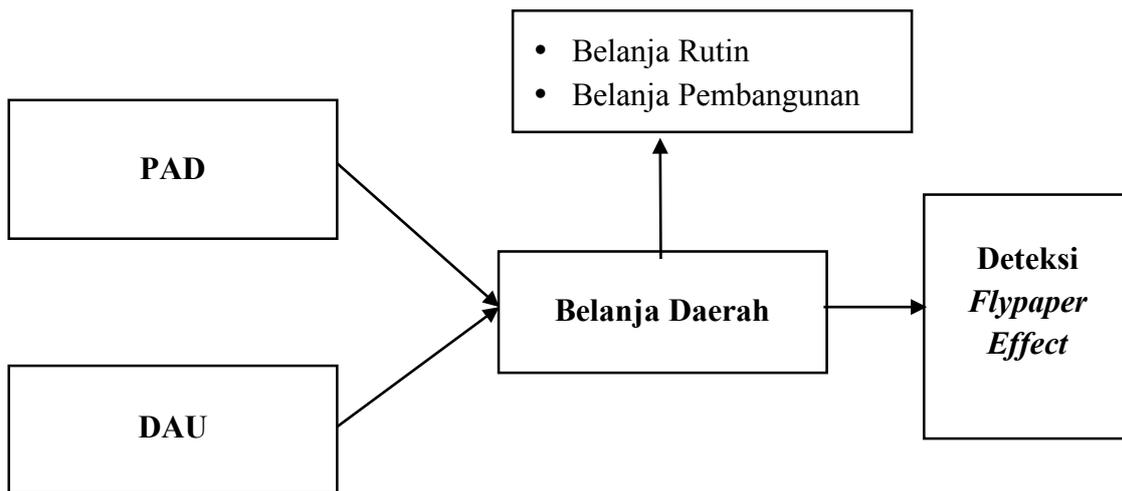
dari efek maupun besar nilai koefisien variabel independen. Selain itu, secara parsial hanya PAD yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAU maupun DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah di Pulau Jawa.

Kemudian, Salawali, Kindangen dan Lopian (2016) juga melakukan penelitian mengenai *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model data panel dengan GLS (*Generalized Least Squares*) diperoleh hasil bahwa terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Sulawesi, dilihat dari besarnya koefisien DAU dibandingkan koefisien PAD terhadap belanja daerah.

Mamuka dan Elim (2014), melakukan penelitian mengenai analisis dana transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer sangat berperan terhadap belanja modal karena jika jumlah transfer dari Pemerintah Pusat dikurangi akan menyebabkan penurunan belanja modal. Dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kab. Kepulauan Talaud untuk menunjang pengelolaan daerah, karena masih minimnya Pendapatan Asli Daerah.

Deller et al., (2002) menganalisis hubungan pendapatan yang berasal dari bagi hasil dengan menggunakan suatu model perilaku keuangan lokal dengan menggunakan data 581 kota dan desa di Wisconsin, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap dolar kenaikan pendapatan per kapita, maka pengeluaran total per kapita meningkat sekitar 12 sampai 15 sen. Untuk setiap kenaikan dalam pendapatan bagi hasil per kapita, peningkatan pengeluaran perkapita mencapai 46-55 sen. Menurut Deller (2002), pola respon daerah ini juga dipengaruhi oleh formula penentuan bagi hasil itu sendiri. Hasil ini konsisten dengan hipotesis *flypaper effect*.

Terkait dengan fenomena *flypaper effect*, penelitian ini memiliki beberapa hipotesis yaitu *pertama*, DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Bengkulu. Artinya, semakin tinggi DAU maka semakin tinggi juga belanja daerah pemerintah Kota Bengkulu. Perumusan hipotesis ini diambil berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian hipotesis yang *kedua* yaitu terjadinya *flypaper effect* pada kinerja keuangan pemerintah Kota Bengkulu. Adapun kerangka penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2
Kerangka Konseptual Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data runtut waktu (*time series*) yang diperoleh dari Laporan Realisasi Keuangan (LRA) Pemerintah Kota Bengkulu dan Statistik Keuangan Pemerintah Propinsi Bengkulu selama Tahun 2000-2015, dan Laporan realisasi APBD yang diperoleh dari BPS serta laporan pendukung lainnya.

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi berganda (*multiple regression*). Menurut Gujarati (2003) bahwa analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Adapun formulasi persamaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \delta$$

Di mana :

BD adalah jumlah belanja daerah (BD)

DAU adalah jumlah Dana Alokasi Umum

α adalah konstanta,

PAD adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah

δ adalah error term

β_1, β_2 adalah koefisien regresi dari masing-masing DAU dan PAD

Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect*, dibandingkan koefisien standar beta dan nilai t-statistik untuk masing-masing variabel. Melo (2002) menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi apabila pengaruh (nilai koefisien) DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh (nilai koefisien) PAD terhadap belanja daerah, dan nilai keduanya signifikan. Seperti yang dikatakan oleh Ghozali (2005) bahwa koefisien standar beta digunakan untuk melihat pentingnya masing-masing variabel independen secara relatif. Begitu juga untuk melakukan pengujian keberartian tiap-tiap koefisien α , β_1 , dan β_2 dapat dilihat pada nilai t statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

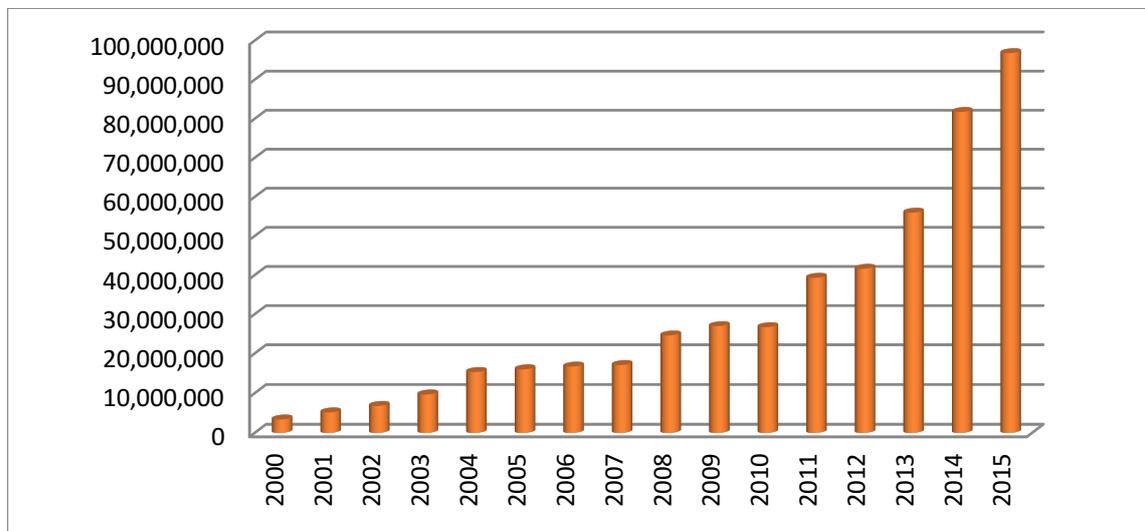
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu

Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya proporsi sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya tingkat PAD yang diperoleh sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Adapun sumber-sumber PAD Kota Bengkulu antara lain; penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Semakin besar PAD yang mampu dicapai oleh suatu daerah, maka semakin baik kemampuan keuangan daerah tersebut.

Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan kemandirian suatu daerah dalam melakukan pembangunan daerahnya, khususnya dalam bidang keuangan. Sejak diterapkan kebijakan desentralisasi, kondisi keuangan Kota Bengkulu semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu dicapai oleh pemerintah Kota Bengkulu sejak Tahun 2000 hingga 2015. Terkait dengan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.

Berdasarkan Gambar 3, selama periode 2000-2015, PAD kota Bengkulu senantiasa berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi PAD Kota Bengkulu sempat mengalami penurunan dalam pertumbuhan PAD pada tahun 2005, 2006, dan 2010. Adapun salah satu yang menjadi penyebab menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bengkulu ini adalah adanya penurunan tingkat DAU dan DAK yang diterima oleh pemerintah Kota Bengkulu. PAD tertinggi terdapat pada Tahun 2015, dan terendah pada tahun 2000. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan harga dan jumlah

transfer (*grant*) yang diterima dari pemerintah pusat. Adapun laju pertumbuhan yang mampu dicapai oleh pemerintah Kota Bengkulu rata-rata per tahun mengalami peningkatan sebesar 26 persen. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu yang tertinggi terdapat pada Tahun 2004 yaitu sebesar 58 persen. Adapun sumber peningkatan PAD ini berasal dari Pajak daerah yaitu sebesar 103 persen dan peningkatan retribusi daerah sebesar 47 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003, serta adanya peningkatan dalam penerimaan hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meskipun secara angka, nominalnya tidak cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya, akan tetapi dengan adanya pertumbuhan PAD yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya sebuah prestasi terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bengkulu pada tahun tersebut.



Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu (BPS Provinsi Bengkulu, data diolah)

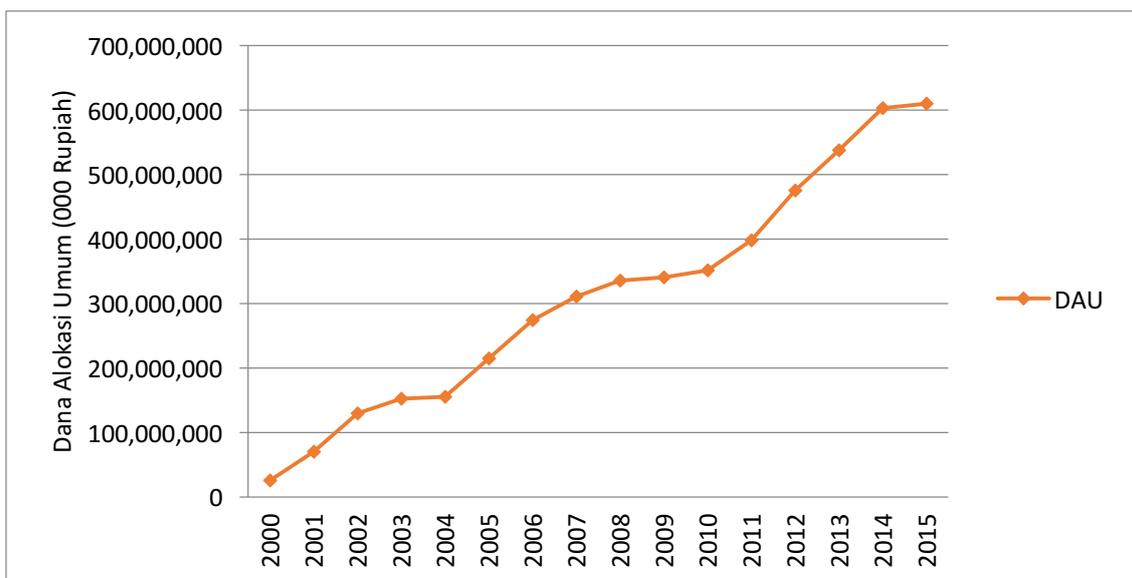
Gambar 3
Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu Tahun 2000-2015 (000 Rupiah)

Perkembangan DAU Kota Bengkulu

Berdasarkan Undang–Undang No.33 tahun 2004, transfer (*grants*) atau dana perimbangan merupakan sumber pendanaan daerah yang diperoleh dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi

Khusus (DAK). Dana Perimbangan salah satunya bertujuan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya.

Dengan adanya DAU yang diterima pemerintah daerah, hal ini akan menambah kemampuan keuangan daerah tersebut. Sejak mulai diterapkan kebijakan desentralisasi pada Tahun 2000 hingga Tahun 2015, jumlah dana perimbangan DAU yang diterima oleh pemerintah Kota Bengkulu senantiasa berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2000 hingga 2015, DAU Kota Bengkulu mengalami pertumbuhan yang cukup besar setiap tahunnya. Adapun rata-rata pertumbuhan DAU per tahun yaitu sebesar 17 persen. Pertumbuhan DAU tertinggi terdapat pada tahun 2005 yaitu sebesar 38 persen, sedangkan pertumbuhan DAU terendah terdapat pada tahun 2009 dan 2015 dengan masing-masing pertumbuhan yaitu sebesar 1 persen jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2008 sebesar 8 persen dan Tahun 2014 sebesar 12 persen. Rendahnya pertumbuhan DAU bukan berarti kecilnya angka nominal DAU yang diterima oleh pemerintah Kota Bengkulu, akan tetapi tingkat pertumbuhan atau penambahan angka DAU yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun DAU tertinggi terdapat pada Tahun 2015 dan terendah terdapat pada Tahun 2000. Perbedaan DAU ini dipengaruhi oleh adanya tingkat inflasi dan besarnya APBN yang dimiliki oleh negara pada tahun tersebut.



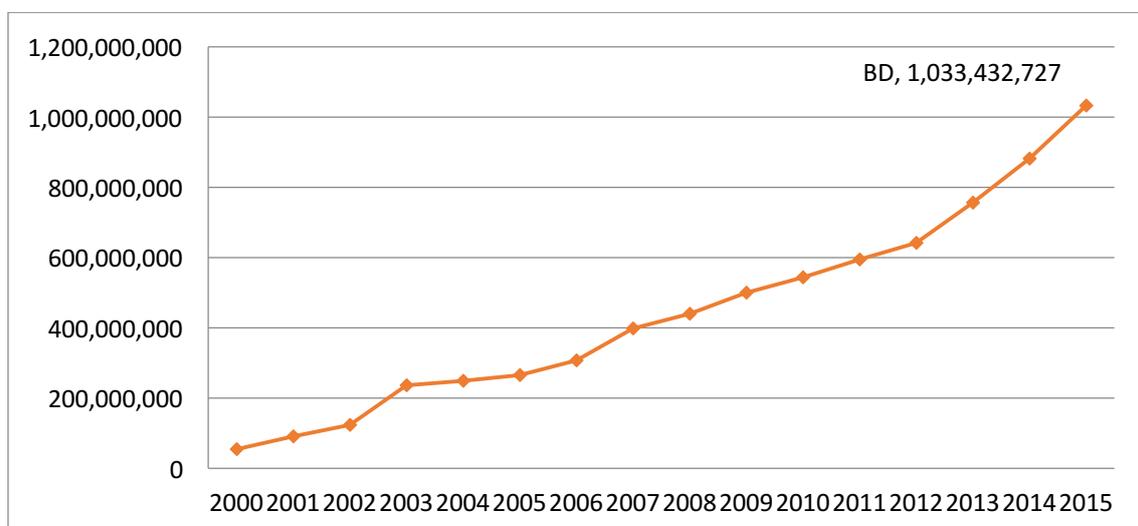
Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu (BPS Provinsi Bengkulu, data diolah)

Gambar 4
Penerimaan Kota Bengkulu Berdasarkan Dana Alokasi Umum (000 Rupiah)

Berdasarkan laporan Statistik keuangan Kota Bengkulu, BPS Provinsi Bengkulu, Pada Tahun 2015 rasio transfer Provinsi Bengkulu sebesar 73,26 persen, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata lebih dari 70 persen penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu bersumber pada dana pusat.

Perkembangan Belanja Daerah Kota Bengkulu

Berdasarkan Kepmendagri 29 Tahun 2002, Belanja Daerah (BD) merupakan semua pengeluaran kas daerah pada periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Belanja daerah dibagi ke dalam dua kelompok yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan (UU No. 25 tahun 1999). Realisasi belanja daerah di Kota Bengkulu dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari biaya pegawai, biaya barang dan jasa dan belanja modal, sementara belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tak terduga. Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah Kota Bengkulu memperoleh dana tambahan guna memenuhi kebutuhannya dalam melakukan pembangunan. Adapun perkembangan belanja daerah Kota Bengkulu sejak Tahun 2000 hingga 2015 dapat dilihat pada Gambar 5.



Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu (BPS Provinsi Bengkulu, data diolah)

Gambar 5
Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2000-2015 (000 Rupiah)

Selama Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2015, belanja daerah Kota Bengkulu senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun belanja daerah tertinggi terdapat pada Tahun 2015 yang didominasi oleh belanja tidak langsung yaitu sebesar 55 persen dan digunakan untuk belanja pegawai sebesar 99 persen dan sisanya digunakan untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta digunakan untuk memenuhi belanja-belanja yang tidak terduga. Sementara belanja langsung Pada Tahun 2015 hanya sebesar 45 persen yang sebagian besar digunakan untuk belanja modal yaitu sebesar 47 persen, sementara belanja barang dan jasa menggunakan anggaran sebesar 37 persen dan sisanya digunakan untuk biaya pegawai.

Adapun angka tertinggi belanja daerah Kota Bengkulu terdapat pada tahun 2015. Tingginya belanja daerah pada Tahun 2015 ini dipengaruhi oleh besarnya suntikan dana dari pemerintah pusat yang berasal dari DAU. Selain itu, besarnya belanja daerah pada Tahun 2015 ini juga disebabkan oleh tingginya PAD Kota Bengkulu karena pada Tahun 2015, Kota Bengkulu memperoleh PAD tertinggi selama kebijakan desentralisasi dijalankan.

Hasil Uji Statistik

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *eviews 9* diperoleh *output* seperti Tabel1 berikut:

Tabel 1
Hasil Estimasi Model

Variabel	Koefisien	Uji-t	Sig.
C	43833.09	1.237716	0.2377
PAD (Pendapatan Asli Daerah)	5.219595	3.578588	0.0034
DAU (Dana Alokasi Umum)	0.814283	3.623951	0.0031
Obs. 16			
R ²	0.960334		
R ² adjusted	0.954231		
f-test	157.3669		
Prob(F-test)	0.000000		

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis, data diolah

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 1 dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$BD = 43833.0937076 + 5.21959460932*PAD + 0.814283055855*DAU$$

Dari persamaan tersebut dapat kita interpretasikan bahwa jika PAD dan DAU bernilai nol, maka belanja daerah sebesar 43.833,09 juta. Sementara nilai koefisien PAD yaitu sebesar 5.219595 dengan probabilitas 0.0034 dan t-Statistik sebesar 3.578588, artinya ketika terjadi kenaikan PAD sebesar Rp1.000.000, maka belanja daerah akan naik sebesar Rp5.219.595 (hasil signifikan pada $\alpha = 0,05$), sedangkan nilai koefisien DAU sebesar 0.814283 dengan probabilitas 0,0031 t-Statistik sebesar 3.623951, artinya ketika terjadi kenaikan DAU sebesar Rp1.000.000, maka belanja daerah akan naik sebesar Rp814.283 (hasil signifikan pada $\alpha = 0,05$). Dari model diatas diperoleh nilai R^2 adjusted sebesar 0.95 yang berarti bahwa besarnya pengaruh variabel PAD dan DAU terhadap belanja daerah yaitu sebesar 95 persen, sedangkan 5 persen dipengaruhi oleh variabel di luar model. Sementara secara simultan, variabel PAD dan DAU berpengaruh secara positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$. Model ini telah lulus semua uji asumsi klasik.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah Kota Bengkulu

Berdasarkan uji t, diperoleh nilai t-Statistik sebesar bernilai positif dengan probabilitas sebesar 0.0034. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial PAD Kota Bengkulu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya ketika PAD meningkat, maka belanja daerah (BD) juga akan meningkat.

Adanya pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap belanja daerah Kota Bengkulu menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah Kota Bengkulu sangat ditentukan oleh besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah Kota Bengkulu. Semakin besar PAD yang diperoleh maka semakin tinggi belanja daerah Kota Bengkulu. Adapun kemampuan PAD Kota Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah sebesar 6,8 persen, sisanya ditutupi dengan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti DAU, DAK, DBH dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan adanya kenaikan belanja daerah dengan memanfaatkan sumber pendanaan dari PAD Kota Bengkulu mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kemandirian Kota Bengkulu dalam menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan daerah. Peningkatan kemandirian ini terlihat jelas dengan adanya *trend* PAD Kota Bengkulu yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Meskipun PAD Kota Bengkulu memiliki *trend* yang cenderung meningkat, menurut Baihaqi (2011) kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 adalah 29,86%. Artinya PAD Provinsi Bengkulu belum begitu berperan dalam pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu upaya yang maksimal guna peningkatan jumlah PAD agar pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pendanaan untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pemerintahannya.

Selama periode 2000-2015, PAD kota Bengkulu senantiasa berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun secara angka, nominalnya tidak cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya, akan tetapi dengan adanya pertumbuhan PAD yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya sebuah prestasi terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bengkulu pada tahun tersebut. Peningkatan PAD tersebut bersumber dari iuran langsung masyarakat berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja modal pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan kegiatan pemerintah daerah dalam belanja modal mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan menstimulus masyarakat untuk berperan serta aktif dalam kegiatan pembangunan serta menjalankan kewajibannya kepada daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Semakin banyak Pendapatan Asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah daerah, yang berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mandiri. Selain itu, peningkatan PAD juga disebabkan oleh adanya kedisiplinan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjalankan peranan dan kewajibannya yang sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula stimulus untuk meningkatkan belanja daerah. Artinya semakin tinggi juga kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah Tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kemampuan dalam merealisasi pendapatan yang diperoleh dari PAD serta semakin besar pengalokasian anggaran belanja daerah untuk tahun selanjutnya. Jika belanja daerah tersebut dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat produktif, maka bisa dipresiksikan ke depannya PAD Kota Bengkulu akan semakin meningkat.

Menurut Maimunah (2006) belanja daerah yang turut mempengaruhi pendapatan. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran (Maimuna dan Akbar, 2008). Oleh karena itu, peranan PAD terhadap belanja modal sangat diharapkan untuk menunjang kegiatan infrastruktur karena infrastruktur yang semakin meningkat akan menambah penghasilan daerah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah akan disesuaikan dengan pendapatan pemerintah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Mamuka dan Elim, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Prakosa (2004), Ashworth et al. (2005), Iskandar (2012), yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan akan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu daerah, maka akan semakin tinggi juga pengeluaran atau belanja daerah tersebut. Selain itu, hasil temuan ini juga didukung oleh kebenaran sebuah hipotesis yang buat oleh Maimunah dan Akbar (2008), dalam hipotesisnya menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *taxspend hypothesis*.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah Kota Bengkulu

Berdasarkan uji t, diperoleh nilai t-Statistik bernilai positif dengan probabilitas sebesar 0,0031. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada $\alpha = 0,05$. Adanya pengaruh positif dan signifikan DAU terhadap belanja daerah Kota Bengkulu menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah Kota Bengkulu sangat ditentukan oleh besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah Kota Bengkulu. Semakin besar DAU yang diperoleh maka semakin tinggi belanja daerah Kota Bengkulu. Adapun, kemampuan DAU untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah sebesar 75 persen, sisanya ditutupi dengan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti PAD DAK, DBH dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Basri (2014), Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, masing-masing secara statistik memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dana transfer sangat

berperan terhadap belanja modal karena jika jumlah transfer dari Pemerintah Pusat dikurangi akan menyebabkan penurunan belanja modal (Mamuka dan Elim, 2014).

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010), yang menemukan bahwa secara parsial DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Apabila DAU mengalami peningkatan, maka belanja daerah juga meningkat, sebaliknya jika DAU menurun maka jumlah belanja daerah juga akan menurun. Hal ini disebabkan dana alokasi umum merupakan bentuk transfer dana yang paling penting selain bagi hasil. Transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum adalah merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada tiap daerah sebagai konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah.

Fenomena *Flypaper Effect* Pada Kinerja Keuangan Kota Bengkulu

Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect*, dibandingkan koefisien standar beta dan nilai t-statistik untuk masing-masing variabel. Melo (2002) menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi apabila pengaruh (nilai koefisien) DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh (nilai koefisien) PAD terhadap belanja daerah, dan nilai keduanya signifikan.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diperoleh masing-masing koefisien untuk variabel PAD terhadap BD yaitu sebesar 5.21959460932 dan koefisien variabel DAU terhadap BD sebesar 0.814283055855 (lihat Persamaan 1 dan Tabel 1). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien PAD lebih besar dari koefisien DAU. Hal ini menunjukkan bahwa secara signifikan tidak terjadi *flypaper effect* pada kinerja keuangan Kota Bengkulu. Hal ini disebabkan karena stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat lebih kecil dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (PAD). Seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2005) bahwa koefisien standar beta digunakan untuk melihat pentingnya masing-masing variabel independen secara relatif. Begitu juga untuk melakukan pengujian keberartian tiap-tiap koefisien α , β_1 , β_2 dan dapat dilihat pada nilai t statistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bengkulu merespon (belanja daerah) lebih banyak dengan menggunakan kemampuan (pendapatan) sendiri daripada menggunakan dana transfer. Penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Ekawarna (2017) yang menunjukkan bahwa meskipun kedua variabel bebas (PAD dan DAU) secara signifikan dapat mempengaruhi variabel terikatnya (belanja daerah), namun PAD ternyata lebih berpengaruh dibandingkan DAU dimana nilai koefisien PAD lebih besar dibandingkan nilai koefisien DAU, sehingga tidak terjadi Flypaper Effect di Kabupaten/Kota induk dan pemekaran di Provinsi Jambi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2012), mengenai *flypaper effect* pada *unditional grant*. Penelitian ini diestimasi dengan panel regresi dengan menggunakan program *evIEWS*. Hasilnya menunjukkan bahwa bahwa *unconditional grants* berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah, PDRB berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap belanja daerah. Kedua, nilai koefisien pendapatan daerah lebih besar dari *unconditional grants* dan keduanya signifikan. Ini menunjukkan tidak terjadinya *flypaper effect* di provinsi Jawa Barat.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Adiputra (2014), mengenai *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 6 (enam) tahun 2005-2010 DAU dan PAD hanya memberikan kontribusi pada tahun 2005 dan 2006, karena pada tahun depan, 2007-2010 persentase kontribusi DAU dan PAD kurang dari rata-rata kontribusi persentase (0,69%). Selama periode 2005-2010, penelitian tidak menemukan fenomena *flypaper effect*. Adapun prediksi sumber pendapatan dari pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan dari 2011-2015, diperkirakan akan terus meningkat dan diharapkan dapat membantu promosi pendapatan daerah di Kabupaten Karangasem untuk menjadi wilayah berpemerintahan sendiri sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah.

Amalia (2015) juga melakukan riset serupa mengenai analisis *Flypaper effect* pada belanja daerah Kabupaten Kota di provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, PAD dan DAU secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah, serta tidak terjadi *flypaper effect* pada kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2013. Selain itu, Pramuka (2010), melakukan penelitian mengenai *flypaper effect* pada pengeluaran pemerintah daerah di Jawa. Melalui pemeriksaan atas laporan keuangan dari semua

kabupaten dan kota tersebut di Jawa, dan menerapkan analisis regresi berganda, terungkap bahwa *flypaper effect* tidak ditemukan, yang menyiratkan bahwa pemerintah setempat tidak mengandalkan hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber dari anggaran mereka. Meskipun DAU dan PAD, terbukti secara signifikan mempengaruhi operasi, modal, dan total pengeluaran pemerintah daerah, untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya.

Sarjenedi, dkk (2014), melakukan penelitian mengenai *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah kabupaten/kota hasil pemekaran di pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan secara parsial PAD juga berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, serta dana alokasi umum tidak berpengaruh lebih besar daripada pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi *flypaper effect*. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi determinan dari dana alokasi umum lebih kecil daripada nilai koefisien determinan pendapatan asli daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota hasil pemekaran pulau Sumatera cukup mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan belanjanya dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah dan tidak bergantung terhadap transfer dari pusat (dana alokasi umum).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diketahui bahwa secara simultan DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kota Bengkulu pada $\alpha = 0,5$, sementara secara parsial, masing-masing DAU dan PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Bengkulu pada $\alpha = 0,5$. Kemudian berdasarkan nilai koefisien dan probabilitas t –statistik pada variabel PAD dan DAU diketahui bahwa koefisien PAD lebih besar dari koefisien DAU dan signifikan pada $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa *Flypaper Effect* tidak terjadi pada Kinerja keuangan Kota Bengkulu. Meskipun demikian, perlu adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu, sehingga bisa meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan Pemerintah Kota Bengkulu terhadap pemerintah pusat.

6. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Adapun yang menjadi keterbatasan penelitian ini adalah cakupan wilayah analisis hanya terbatas pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu dan jangka waktu analisis yang sangat singkat. Harapannya, peneliti selanjutnya bisa mengkaji seluruh kinerja keuangan pemerintah daerah dengan cakupan yang lebih luas dan menambah jangka waktu analisis. Selain itu, dalam penelitian ini belum memasukkan model regresi dengan *lag* satu tahun sebelumnya pada variabel DAU, sehingga adanya penambahan *lag* tersebut akan membuat prediksi semakin kuat terhadap belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. (2012). Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa –Bali). *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 21(1), 1-19.
- Adiputra, I Made Pradana. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH*. 3(2), 1232-1261.
- Amalia, Fitri. (2015). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Banten . *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 11(1), 15-25.
- Ansori, Wakhid, & Muthmainah. (2018). Fenomena Flypaper Effect Atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan NUSTRA. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 18 (2), 151-163.
- Ardanaeswari, Sherlinda., Laut, L. Togar., & Destiningsih, Rian. (2019). Fenomena *Flypaper Effect* pada PAD, DAU dan DBH serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa Tahun 2013-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 4 (1), 479-494.
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77-91.
- Ashworth, J., Geys, B. & Heyndels, B. (2005). Government Weakness and Local Public Debt Development in Flemish Municipalities. *International Tax and Public Finance*, 12, 395-422.
- Baihaqi. (2011). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*. 1(3), 246-266.
- BPS. (2016). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.
- BPS. (2016). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.

- Deller, Steven, Craig S Maher., & Victor, Lledo. (2002). Wisconsin Local Government, State Share Revenue and the Illusive Flypaper Effect. *Wisconsin-Madison Agricultural and Applied Economics Staff Papers* 451, Wisconsin-Madison Agricultural and Applied Economics Department.
- Ekawarna, Shita Unjaswati. (2017). Analisis Flyapper Effect Pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(3), 167-184.
- Elmi, Bachrul. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. (2003). *Basic Econometric*. New York: The McGraw Hill Companies Inc.
- Hines, J.R. dan Richard H. Thaler. (1995). Anomalies – The flypaper effect. *Journal of Economic Perspectives*, 9 (4): 217-226.
- Holtz-Eakin, Whitney Newey, & Harvey Rosen. 1985. Implementing causality test with panel data, with an example from local public finance. *NBER Technical Working Paper No. 48*.
- Iskandar, Irham. (2012). Flypaper Effect Pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 13(1), 113-131.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Kuncoro, Haryo. (2007). Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan kabupaten di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi X*, UNHAS Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Maimunah, Mutiara (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/Kota di pulau Sumatera. *Paper disajikan Symposium Nasional Akuntansi IX*. Padang, 2006.
- Maimunah, Mutiara dan Akbar, Rusdi. (2008). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/Kota di pulau Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, II (1), 37-51.
- Mamuka, Veronika dan Elim, Inggriani. (2014). Analisis Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*. 2(1), 464-655.
- Megasari, Ida Ayu Gede Sutha. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper Effect Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Melo, Ligia. (2002). The Flypaper Effect Under Different Institutional Context: The Columbian Case. *Public Choice*. 111(3-4), 317-345.

- Nanga, Muana. (2005). Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah Posisi Fiskal Pasca Otda Lebih Baik?. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner Kritis*, 27, 2-3.
- Nurhayati & Septiana, Diana. (2018). *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatra. *Media Ekonomi*, 26(2), 111-120.
- Oates, Wallace E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empiric di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI*, 8 (2).
- Pramuka, Bambang Agus. (2010). Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 1-12.
- Rahmawati, Nur Indah. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Semarang: FE-UNDIP.
- Salawali, W.A., Kindangen, P., & Lopian, A.ch.P. (2016). *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) serta pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah*, 18(2).
- Saragih, P.J. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sarjenedi dan Zainur dan Ethika (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Hasil pemekaran di Pulau Sumatera, *SIMPOSIUM Akuntansi Nasional*. 4(1).
- Setiawan, Anjar. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjutak, & Bambang Brodjonegoro. (2002). *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Kompas.
- UU No. 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- UU No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- UU No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.

